



MINTA SOLUSI

Ratusan sopir bentor (becak motor) mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ di Babarsari

Mereka meneriakkan tuntutan agar kebijakan Malioboro Full Pedestrian tidak terburu-buru diterapkan.

Penyelenggaraan car free day (CFD) yang digelar setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 05.00 hingga 09.00. Momen itu adalah waktu mereka untuk bisa mengantar wisatawan berbelanja oleh-oleh khususnya bakpia.

TUNCA SELURUH
SOPIR MENDEPAKTKAN
"PENGANTIAN BETRIK"



Betrik Dulu sebelum Malioboro Full Pedestrian

Dari 900 Sopir Bentor Baru 80 Yang Dapat Becak Listrik

SLEMAN - Ratusan sopir bentor (becak motor) mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ di Babarsari, Caturtunggal, Kapanewon Depok,

Sleman, Kamis (30/7). Massa aksi mulai berdatangan pada pukul 08.30 lengkap dengan membawa bentor masing-masing

Baca Betrik... Hal 7



SAMPAIKAN ASPIRASI: Audiensi sopir bentor dengan menggeruduk Kantor Dinas Perhubungan DIJ di Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, kemarin (30/7).

Betrik Dulu sebelum Malioboro Full Pedestrian

Sambungan dari Hal 1

Mereka meneriakkan tuntutan agar kebijakan Malioboro Full Pedestrian tidak terburu-buru diterapkan, tetapi menunggu agar seluruh sopir mendapatkan penggantian becak listrik (betrik).

Komandan Satgas Persatuan Bentor Jogjakarta Heru Santoso menerangkan, semestinya pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Para bentor ini tidak meminta pekerjaan, tetapi justru menciptakan kerja secara mandiri. Kehati-hatian dalam realisasi Malioboro Full Pedestrian yang diwacanakan pada November mendatang, sangat diperlukan karena menyangkut sumber penghidupan mereka. "Ini masalah perut. Orang sedang mencari nafkah tapi ditutup itu tidak masuk akal. Sebelum dikasih betrik, jangan ditutup," katanya saat audiensi yang dihadiri oleh jajaran Dishub DIJ.

Dia juga menyototi penyelenggaraan car free day (CFD) yang digelar setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 05.00 hingga 09.00. Momen itu adalah waktu mereka untuk bisa

mengantar wisatawan berbelanja oleh-oleh khususnya bakpia. Sementara pada hari kerja umumnya pendapatan cenderung minim.

Apabila CFD ingin diterapkan pada momen tersebut sebenarnya cukup separuh jalan saja, tidak perlu ditutup seluruhnya. Dia mengilustrasikan dengan kebijakan bagi aksi demonstrasi yang hanya bisa menutup separuh jalan. Sementara bagi mereka yang punya uang, lalu ingin berolahraga dan senam, justru diterapkan kebijakan penutupan jalan seluruhnya.

"Kami yang kere-kere ini mencari nafkah, utang bayar becak saja belum lunas. Jogja itu asetnya Malioboro, tapi pemerintah sakgelem dewe," katanya.

Heru juga meminta agar ada koordinasi yang baik antara pemerintah. Lantaran dia mengklaim dari Pemkot Jogja membolehkan mereka beroperasi, tetapi dari Pemprov DIJ justru melarang. Tak jarang para sopir bentor ini juga mesti berseteru dengan petugas Dishub DIJ saat di lapangan. Sampai titik darah penghabisan dia memastikan mereka akan terus mengawal

aspirasi ini.

Hal senada disampaikan Ketua Paguyuban Becak Motor DIJ Parmin. Mereka tidak masalah jika bentor ditarang dan yang diperbolehkan hanya betrik. Hanya saja dari sekitar 900 sopir bentor yang berada di sepanjang Jalan Malioboro, baru sekitar 80 orang yang mendapatkan betrik tersebut. Itu pun hampir separuhnya dalam kondisi sudah rusak mesin dan kini masih berada di bengkel untuk perbaikan mandiri.

Selama bantuan yang disalurkan masih bertahap, kebijakan full pedestrian mestinya diterapkan secara bertahap dan mereka tetap diperbolehkan mengais rezeki. Dia menilai, pemerintah sebagai wakil rakyat seharusnya memberi keadilan bagi masyarakat dan bukan menyengsarakan. "Kami mendukung full pedestrian demi tercapainya kerja pemerintah, tapi jangan kami dikorbankan seperti ini," ujarnya.

Begitu juga dengan sopir bentor yang lain, Slamet. Ketika kebijakan CFD diterapkan sejumlah kendaraan tetap bisa lewat, seperti bus Trans Jogja, andong, hingga kenda-

raan dinas. Pembatasan akses pada bentor dia sebut tidak relevan lantaran beroperasi dengan kecepatan 10 kilometer/jam.

Harapannya, pemerintah bisa memperhatikan mereka yang sudah kesulitan dengan hadirnya transportasi daring. "Bajaj yang tidak berizin malah dishub tutup mata. Kami makan uap rekoso muni! Jogja istimewa. Jangan menyiksa rakyat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dishub DIJ Chrestina Erni Widayastuti yang langsung hadir dalam audiensi menjelaskan, kebijakan Malioboro Full Pedestrian diterapkan dalam rangka pengurangan emisi karbon. Sekaligus dalam rangka menjaga peradaban sumbu filosofis. "Kami paham ini urusan perut dan semua butuh pendapatan untuk menghidupi keluarga," katanya.

Dia sebut, pemerintah sudah menyerahkan 90 bantuan betrik. Lalu ada 200 unit bantuan dari presiden, 50 unit bantuan dari KAI, dan terbaru dari kementerian keuangan sejumlah 80 betrik hanya saja baru 15 yang diserahkan.

Dishub juga mengupayakan

secara perlahan. Sementara soal CFD, dia sebut ini adalah program kerja sama dengan Pemkot Jogja. Petugasnya di lapangan memang diminta untuk mengantar lalu lintas demi memberi kesempatan pejalan kaki agar bisa beraktivitas dengan nyaman. "Kami pelaksana teknis,

bukan pengambil kebijakan,"

tegasnya berulang kali. Chrestina memastikan, seluruh aspirasi ini akan disampaikan kepada pimpinan agar nantinya bisa didapat solusi terbaik. Ketika sudah ada hasilnya, dia berjanji akan disampaikan kepada perwakilan massa aksi. (del/laz/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

